



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

DAMPAK KONFLIK INDIA-PAKISTAN 2025 TERHADAP KINERJA EKSPOR INDONESIA: ANCAMAN DAN ANTISIPASI

Rasbin

Analisis Legislatif Ahli Madya
rasbin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada awal Mei 2025, konflik bersenjata kembali pecah antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir. Meskipun berlangsung singkat dan diakhiri dengan gencatan senjata pada 10 Mei 2025, konflik tersebut memicu ketegangan regional yang signifikan dan berdampak pada perekonomian negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia. India merupakan mitra dagang keempat terbesar bagi Indonesia (setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang), dengan nilai ekspor mencapai sekitar 9% dari total ekspor nasional, sedangkan Pakistan sekitar 1,9%.

Indonesia menikmati surplus perdagangan yang signifikan dengan kedua negara. Pada 2024, surplus perdagangan Indonesia dengan India mencapai sekitar US\$15 miliar dan dengan Pakistan sekitar US\$5 miliar. Komoditas andalan Indonesia seperti batubara dan minyak sawit mentah (CPO) mendominasi ekspor ke India dan Pakistan. Mengingat besarnya peran kedua pasar tersebut, konflik antara kedua negara tersebut berpotensi memengaruhi volume ekspor Indonesia dan pergeseran tujuan ekspor secara signifikan.

Konflik India-Pakistan berisiko langsung menurunkan permintaan ekspor Indonesia, terutama dari India dan Pakistan. Ketika sebuah negara terlibat dalam perang, alokasi anggaran cenderung difokuskan pada sektor militer, yang menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang-barang impor non-esensial, termasuk batubara dan CPO.

Data tahun 2024 menunjukkan India merupakan tujuan ekspor CPO RI terbesar (4,27 juta ton), disusul Pakistan di peringkat kedua (3 juta ton). Jika perang membuat ekonomi kedua negara tertekan, pembelian CPO dan komoditas Indonesia lainnya berpotensi mengalami penurunan. Indikasi penurunan permintaan sudah mulai terlihat. Ekspor batubara Indonesia ke India pada Maret 2025 tercatat hanya 7,42 juta ton, turun sekitar 31,42% dibanding Maret 2024. Penurunan ini mengindikasikan pelemahan permintaan dari India, yang bisa diperparah oleh situasi perang. Begitu pula di sektor minyak sawit, pelaku industri khawatir konflik akan memangkas order dari India dan Pakistan, sehingga mengurangi volume ekspor CPO Indonesia ke kedua negara tersebut. Di lain sisi, pelaku industri menghadapi kekhawatiran pembatalan kontrak dan penundaan pengiriman akibat ketidakpastian pasar. Meskipun belum ada gangguan fisik terhadap logistik ekspor, sentimen negatif telah membuat beberapa importir menahan diri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui potensi dampak tersebut, namun tetap menjaga optimisme dengan menyatakan bahwa kinerja ekspor hingga awal Mei 2025 masih tumbuh secara agregat. Dengan kata lain, konflik India-Pakistan secara langsung bisa mengancam penurunan volume ekspor Indonesia ke dua pasar Asia Selatan itu dan memaksa pengalihan tujuan ekspor ke negara lain jika kondisi memburuk.

Selain penurunan permintaan langsung, konflik ini memicu disrupsi tidak langsung yang berpengaruh terhadap kelancaran ekspor. Penutupan wilayah udara Pakistan dan gangguan di pelabuhan seperti Karachi berdampak pada rute pelayaran dan penerbangan internasional yang melewati kawasan Asia Selatan.

Jalur perdagangan ke Timur Tengah dan Eropa yang melintasi Samudra Hindia ikut terganggu, sehingga biaya logistik meningkat dan waktu pengiriman lebih lama. Hal ini bisa menggerus daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global. Dari sisi harga komoditas global, ketidakpastian geopolitik menekan harga ekspor unggulan Indonesia. Harga referensi CPO Indonesia untuk Mei 2025 ditetapkan US\$924,46 per ton, turun 3,86% dari bulan sebelumnya, sebagian besar karena melemahnya permintaan dari India dan Pakistan. Di sisi lain, pasokan batubara yang tak terserap di pasar India bisa menekan harga batubara secara global karena surplus. Hal ini berpotensi menggerus nilai ekspor Indonesia secara keseluruhan.

Konflik India-Pakistan juga memicu kekhawatiran investor terhadap stabilitas kawasan, sehingga memunculkan risiko aliran modal keluar dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Jika rupiah tertekan akibat volatilitas pasar global, maka biaya impor bahan baku akan meningkat serta meningkatnya biaya angkut internasional. Kombinasi ini berpotensi meningkatkan harga produk di dalam negeri.

Atensi DPR

Konflik India-Pakistan berpotensi menurunkan kinerja ekspor Indonesia dengan kedua negara tersebut. Pemerintah Indonesia harus berusaha meredam dampak konflik India-Pakistan. DPR RI melalui Komisi VI memiliki peran strategis memastikan Kementerian Perdagangan untuk memperkuat daya tahan sektor ekspor, yakni diversifikasi pasar ekspor, dan menyiapkan opsi kebijakan deregulasi ekspor. *Pertama*, Indonesia harus melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional. Target negara non-tradisional untuk pasar ekspor Indonesia diantaranya Timur Tengah, Afrika (seperti Mesir), dan Asia Selatan lainnya (seperti Bangladesh dan Sri Lanka). *Kedua*, di sisi kebijakan perdagangan, Pemerintah Indonesia perlu menyesuaikan regulasi demi mendukung eksportir. Seperti kebijakan penyesuaian mekanisme bea keluar CPO. Ketika harga referensi CPO turun akibat berkurangnya permintaan, otomatis tarif pungutan ekspor dan bea keluar akan turun sesuai aturan, sehingga daya saing harga CPO Indonesia bisa terjaga. Pemerintah juga dapat meningkatkan penyerapan domestik komoditas sebagai *buffer*. Misalnya, program mandatori biodiesel (B35) dapat diperluas untuk menyerap kelebihan pasokan CPO dalam negeri jika ekspor tersendat.

Sumber

antaranews.com, 8 Mei 2025;
detikfinance.com, 12 Mei 2025;
kompas.com, 7, 11, & 12 Mei 2025;
liputan6.com, 8 Mei 2025;
moderndiplomacy.eu, 8 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making